

DEMOKRASI KONTESTASI PEMILU DALAM PANDANGAN ISLAM

Taufikurrahman, Aditya Satria Wijaya, M Mansur, Ahmad Wiyono
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Institut Agama Islam Miftahul
Ulum Pamekasan, Universitas Islam Madura, Pamekasan
Email: Taufikurrahman.if@upnjatim.ac.id, mansyurdi@gmail.com,
ahmadwiyono@uim.ac.id

Abstrak

Demokrasi adalah sebuah sistem politik yang telah menjadi landasan bagi banyak negara di seluruh dunia dalam melaksanakan pemilihan umum. Sistem ini memberikan hak kepada rakyat untuk memilih wakil-wakil mereka, sehingga suara setiap individu dianggap bernilai dan memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan politik. Namun, dalam konteks masyarakat Muslim, pertanyaan seputar penerapan demokrasi dan sejauh mana hal ini sesuai dengan ajaran Islam telah selalu menjadi perdebatan yang menarik. Pemilu merupakan tonggak penting dalam terciptanya demokrasi dalam suatu negara. Sebagai negara dengan pemeluk agama Islam terbanyak, Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang memadukan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai Islam. Dalam tulisan ini, penulis akan mengais informasi tentang bagaimana demokrasi Islam diterapkan dalam Pemilu, dengan fokus pada perspektif Islam. Penulis akan membahas isu-isu kunci yang berkaitan dengan demokrasi dalam Islam, mengulas pandangan para ahli dan pemikir di civitas perguruan tinggi tentang pemilu, serta mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya menjalankan demokrasi secara sesuai dengan nilai-nilai syariah. Diharapkan tulisan ini dapat memberikan pengetahuan lebih dalam tentang nilai demokrasi Islam yang terkandung, yang meliputi As Syura, Al 'Adalah, Al musawah, Al Amanah, Al Masuliyah, dan Al Hurriyyah dalam pemilihan umum di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama Islam yang berguna untuk khalayak umum khususnya umat muslim.

Kata Kunci: Demokrasi (Kontestasi Pemilu), Dalam Pandangan Islam

Abstract

Democracy is a political system that has become the basis for many countries around the world in holding general elections. This system gives the people the right to elect their representatives, so that each individual's voice is considered valuable and has an important role in political decision making. However, in the context of Muslim societies, questions surrounding the implementation of democracy and the extent to which this is in accordance with Islamic teachings have always been an interesting debate. Elections are one of the important moments in Indonesia's democratic journey. As a country with the largest Muslim population in the world, Indonesia has its own challenges in holding general elections that combine democratic principles with Islamic values. In this article, we will dig deeper into how Islamic democracy is implemented in elections, with a focus on the Islamic perspective. The writer will discuss key issues related to democracy in Islam, review the views of experts opinion and thinkers in the higher education

community regarding elections, and identify aspects that need to be considered in efforts to implement democracy in accordance with sharia values. It is hoped that this paper can provide deeper insight into the values of Islamic democracy contained, which include As-Shura, Al-'Adalah, Al-musawah, Al-Amanah, Al-Masuliyah, and Al-Hurriyyah in general elections in Indonesia with consider the values of the Islamic religion which are useful for the general public, especially Muslims.

Keywords: Democracy (Election Contestation), From an Islamic View

PENDAHULUAN

Pemilu di Indonesia selalu menjadi momen penting dalam menentukan arah dan masa depan negara. Dalam konteks ini, demokrasi Islam muncul sebagai elemen krusial yang memengaruhi dinamika politik. Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, memiliki keunikan dalam mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi dengan prinsip-prinsip Islam dalam proses pemilihan umum. Demokrasi Islam merujuk pada upaya menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dalam kontestasi pemilu, hal ini tercermin dalam berbagai nilai syariah dan mencoba mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini menimbulkan diskusi yang mendalam mengenai sejauh mana demokrasi Islam dapat berkontribusi dalam menjaga kedaulatan rakyat sambil mempertahankan identitas keagamaan. Penting untuk memahami bahwa demokrasi Islam bukanlah konsep yang homogen, melainkan memiliki variasi interpretasi dan implementasi. Dalam kaitannya dengan pemilu di Indonesia, perdebatan seputar bagaimana demokrasi Islam berinteraksi dengan sistem politik yang lebih luas menjadi fokus perhatian. Beberapa pihak melihatnya sebagai cara untuk memperkuat nilai-nilai moral dalam tata kelola negara, sementara yang lain mungkin khawatir akan potensi ketegangan antara aspek-aspek demokrasi sekuler dan nilai-nilai agama. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi dinamika demokrasi Islam dalam kontestasi pemilu di Indonesia, menyoroti definisi demokrasi dalam perspektif islam, tantangan yang dihadapi, dan dampaknya terhadap mekanisme pemilu jika dituangkan nilai syariah di dalamnya.

METODE PENELITIAN

Dalam karya tulis ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan melansir dari beberapa sumber informasi berita, jurnal, artikel, media sosial, media massa, buku dan stigma yang sudah menjadi pandangan umum pada masyarakat. Dalam penelitian ini, diperlukan pemahaman komprehensif dari penulis dengan menjabarkan informasi secara deskriptif, objektif, dan sistematis. Sumber data didapatkan dari beberapa studi literatur di internet yang berkaitan dengan sistem demokrasi dan pengimplementasiannya dalam perspektif islam.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Sadek, J. Sulaymân, ada beberapa prinsip yang membentuk demokrasi yang telah menjadi standar dalam penerapannya¹. Di antaranya, setiap warga negara memiliki kebebasan berbicara, adanya pemilu untuk menetapkan pemerintah yang berkuasa tanpa mengabaikan kendali pihak minoritas, Peran partai politik yang menjadi

¹ Iryani, Eva, *Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2, Hal 27, 2017

distributor aspirasi kepentingan politik rakyat, kekuasaan terpisah antara eksekutif, legislatif dan yudikatif, tegaknya supremasi hukum, dan kebebasan setiap insan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa diintervensi oleh pihak manapun.

Dilihat dari sisi etimologis, istilah "demokrasi" bersumber dari bahasa Yunani yakni "*demos*", yang artinya rakyat, dan "*cratos*", yang artinya kekuasaan. Demokrasi berarti rakyat memiliki kedaulatan tertinggi pada sebuah negara yang menganut konsep demokrasi. Dengan kata lain, rakyat bertanggung jawab atas sistem kekuasaan tertinggi negara. Robert Dahl menggambarkan demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan yang mengedepankan rakyat sebagai pemegang utama setiap kedaulatan dalam urgensi menjalankan kehidupan bernegara. Adapun Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi memiliki arti pemerintahan di mana semua rakyat berpartisipasi dan memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya²

Dalam penerapan demokrasi, banyak terjadi kebuntuan makna dari beberapa ahli di dunia. Mereka masih sulit menetapkan bahwa demokrasi ini adalah sebuah konsep sistem pemerintahan atau tujuan negara. Adapun arti demokrasi menurut Presiden Amerika Serikat ke-16, Abraham Lincoln, adalah sebuah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat³. Dengan kata lain, Rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dari sistem demokrasi. Semua aktivitas harus berorientasi pada rakyat. Abraham Lincoln sendiri adalah tokoh yang mempopulerkan sistem demokrasi. Pada abad 18, Demokrasi berkembang pada negara-negara besar seperti Perancis, Inggris, dan Amerika. Untuk penyebarannya di wilayah luar Eropa, Demokrasi mencuat setelah perang dunia dua berakhir, hal ini dikarenakan munculnya banyak negara baru yang merdeka yang menginginkan kesejahteraan rakyat, termasuk Indonesia. Di Indonesia, konsep demokrasi diterapkan secara langsung pada pemilu yang pertama, yakni tahun 1955. Pada waktu itu Rakyat Indonesia diberi kebebasan memilih sendiri wakil rakyatnya.

Menurut Nelson Mandela demokrasi ialah ketika seseorang ingin berbicara maka ia dapat berbicara⁴. Hal ini berkaitan dengan kebebasan berpendapat yang cukup relevan dengan Islam. Dalam perspektif Islam hal ini relevan pada Al-Qur'an, yakni pada Q.S. Al-Baqarah ayat 159.

Islam kompatibel dengan demokrasi adalah suatu hal yang menjawab sebuah pertanyaan; Islam dan demokrasi ialah dua entitas yang berbeda, meskipun keduanya berbeda, Islam dan demokrasi merupakan hal yang memiliki kesinambungan ketika berhadapan dengan politik dalam diri umat Islam. Islam tidak mengajarkan kediktatoran seperti negara-negara yang menganut paham fasisme.⁵ Dengan menggunakan ayat-ayat yang terdapat kandungannya dalam Al-Qur'an, agama Islam memberi individu kebebasan untuk menyuarakan pendapat mereka sendiri. Selain itu, hal ini memberi Anda kebebasan untuk mempertimbangkan pendapat pihak lain dan memutuskan yang terbaik dari pendapat tersebut. Karena ajaran Islam memberikan ruang yang luas untuk diskusi dan pertukaran pendapat. Islam juga mengajarkan kita bagaimana berinteraksi dan bertukar pikiran yang mencerminkan akhlaqul karimah. Namun, Al-Qur'an adalah otoritas atau

² Rangkuti, Afifa, *Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 2019

³ S, Boritt, Gabor, *Lincoln Tentang Demokrasi*, Jakarta International Law Book Services, 2017

⁴ Gusmiarni, Fitri Rahayu, Murdiyah Winarti, Ayi Budi Santosa, *Menuju Keadilan & Kebebasan: Perjuangan Nelson Mandela Untuk Mewujudkan Demokrasi Bagi Afrika Selatan Tahun 1990-1994*, Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, Vol. 11, No. 02, 2022

⁵ AY, Jallow, *Freedom of Expression from the Islamic Perspective*, Journal of Mass Communication & Journalism, 2015

hukum pertama dan utama dalam agama Islam, asalkan berdasarkan kebenaran, dan tidak menyinggung pemikiran ataupun keyakinan orang lain.⁶

Demokrasi Islam dalam Kontestasi Pemilu

Penerapan demokrasi dalam pemilu tentu saja bisa ditilik dari kaca mata islam. Islam memiliki perspektif yang khas pada hal ini. Islam berperan untuk mewujudkan demokrasi yang adil, jujur, dan arif dengan menggandeng nilai-nilai syariah. Pemilihan umum (pemilu) merupakan upaya mewujudkan masyarakat yang demokratis di mana warga negara memilih pemimpin dan perwakilan mereka melalui suara terbuka atau rahasia. Secara umum, pemilihan umum merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi, memberikan hak partisipasi kepada masyarakat dalam menentukan arah pemerintahan dan kebijakan negara. Proses ini melibatkan kompetisi antarcalon yang diharapkan memiliki visi dan misi untuk mewakili kepentingan rakyat.

Dalam perspektif Islam, pemilihan umum sejalan dengan prinsip syura atau musyawarah, di mana keputusan diambil melalui konsultasi dan kesepakatan bersama. Meskipun Islam memberikan pedoman tentang kepemimpinan yang adil dan berkeadilan, pemilihan umum dapat dianggap sebagai metode efektif untuk mencapai tujuan tersebut, asalkan nilai-nilai agama dijunjung tinggi dalam proses tersebut. Perspektif Islam pada pemilihan umum menekankan pada kewajiban transparansi, keadilan, dan keberpihakan terhadap kepentingan umum, sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang mengedepankan keadilan sosial dan keberpihakan terhadap masyarakat.

Demokrasi Islam dalam Kontestasi Pemilu

Pemilihan umum, juga dikenal sebagai "pemilu", adalah langkah pertama menuju jabatan politik, seperti presiden, wakil rakyat, camat, hingga kepala desa. Selain itu, pemilihan juga merupakan upaya untuk mempengaruhi rakyat yang tidak memaksakan kehendak untuk menduduki jabatan tersebut⁷. Dalam kerangka tata negara islam, konsep Syura' erat kaitannya dengan upaya menjalankan pemerintahan yang ideal, menjamin kesejahteraan rakyat, dan sebagai pelayan rakyat dalam rangka meraih kemaslahatan bersama (al-maslahat al-ammah). Menurut Syathibi, ijma' dan kepentingan umum adalah komponen utama teori hukum (selain Assunah dan Alquran). Ini dibangun dari prinsip-prinsip universal ataupun umum (*Kulliyat*). Kemudian prinsip-prinsip mendasar dan umum inilah yang membentuk pola syari'ah, yang merujuk dari beberapa prinsip-prinsip kompleks yang khusus (*juziyyat*)⁸. Prinsip Syura ini merupakan tujuan yang seharusnya dicapai dari pemilu berdasarkan nilai syariah ataupun latar belakang terciptanya pesta demokrasi berupa pemilu.⁹

Tujuan Demokrasi Islam dalam Kontestasi Pemilu

Ketika sudah mengenal konsep demokrasi seperti yang sudah dijabarkan diatas, pemilu di indonesia diadakan untuk melahirkan sistem pemerintahan yang bermanfaat untuk rakyat. Sehingga rakyat berpartisipasi secara langsung dalam mewujudkan sebuah

⁶ Sahrani, Fadhil Ahmad, *Kebebasan Berpendapat dalam Al-Qur'an*, Jurnal al-Fath, Vol. 08. No. 02, 2014

⁷ Pratama, Andreka Yuda, *Model Demokrasi Pemilu Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Perkembangan Pemikiran Modern Dalam Islam, 2022

⁸ Santoso, Lukman, *Prinsip Syura' dalam Konstitusional Islam*, Jurnal Dinamika Hukum dan Pendidikan di Indonesia, Vol.1, No, 1, Hal. 43-64, 2013

⁹ Iqbal, Muhammad, *Pemikiran Politik Islam*, Kencana, Vol. 01, 2015

kesejahteraan. Pemilu memiliki makna sebagai serangkaian kegiatan politik demokratis yang dilaksanakan untuk mencukupi urgensi masyarakat dan selanjutnya disalurkan pada berbagai bentuk kebijakan (*policy*) yang dilaksanakan dan diharapkan mewakili rakyat sebagai pemegang kekuasaan, terutama dalam menentukan pemimpin dalam konteks demokrasi Pancasila. Sistem pemilihan bisa berupa berbagai metode untuk mengubah suara demokratis rakyat ke dalam sejumlah kursi di lembaga legislatif atau parlemen¹⁰. Pemilu ini juga bisa menjadi ajang siapapun untuk menyalurkan legitimasi demokrasi pada negara tak terkecuali pada kaum perempuan. Dalam pemilihan umum sendiri terdapat peraturan bahwa partisipasi minimum kaum perempuan adalah 30%, hal ini menunjukkan bahwa pengadaan pemilu di Indonesia ini juga sebagai bentuk kesetaraan gender. Perempuan Indonesia memiliki peran yang signifikan dan strategis dalam pemilu. Sangat penting bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia untuk mewujudkan proses demokratis yang inklusif atau mencakup dan representatif. Penguasa yang erat kaitannya dengan laki-laki pun bisa dipatahkan. Praktik pemilu juga memiliki hikmah meminimalisir adanya tindakan patriarki¹¹. Meski bukan tujuan sepenuhnya, pelibatan perempuan dalam pesta demokrasi juga mencerminkan perintah Allah SWT dalam kitab-Nya, Al-Qur'an tentang kesetaraan gender dalam Q.S. An Nahl ayat 97.

Nilai Demokrasi Dalam Islam

Dalam konsep keislaman, terdapat elemen-elemen demokrasi yang cukup mencakup segala hukum syariat demokrasi. Adapun elemen utama demokrasi dalam pandangan Islam meliputi: al musawah, as syura, al amanah, al 'adalah, al hurriyyah dan al masuliyah. Dalam tulisan ini akan saya jelaskan secara konseptual apa itu elemen pokok demokrasi dan bagaimana implementasinya pada pemilu dengan merujuk berbagai jurnal yang tersedia¹².

Pertama, As Syura Syura adalah prinsip pengambilan keputusan dengan musyawarah yang disebutkan dalam al-Qur'an. Pada zaman khulafaurrasyidin (kekhalfahan Abu Bakar), ahl halli wa-l'aqdi adalah substansi yang diketahui sebagai pelaksana konsep syura dalam tata kehidupan berdemokrasi Islam. Lembaga mirip dengan tim pembentuk yang memilih khalifah atau kepala negara. Musyawarah sangat penting untuk mencapai kesepakatan dan memikul tanggung jawab bebarengan dalam proses pengambilan keputusan. Maka, semua orang akan bertanggung jawab atas keputusan pemerintah. Sudut pandang musyawarah juga menunjukkan apresiasi kepada pihak lain karena pendapat yang diusulkan menjadi pertimbangan bersama. Sebagai bukti betapa vitalnya musyawarah dalam tata kehidupan bermasyarakat, baik di tingkat bangsa maupun negara, Nabi Muhammad sendiri mengajarkan musyawarah kepada umatnya untuk memaksimalkan kesepakatan yang berdampak baik pada keharmonisan umat¹³. Di Indonesia, lembaga yang mengatur jalannya pemilihan umum adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU bertugas menjadi fasilitator pesta demokrasi. Sebagai penyelenggara, KPU ini harus bersifat netral dan tidak boleh diintervensi oleh pihak

¹⁰ Ginanjar, Diyar, H, Fauziah, H, Uu, Nurul, *Dimensi Pemilu Dalam Sistem Distrik Dan Proporsional*, Khazanah Multidisiplin, Vol. 1, No, 1, Hal. 22, 2020

¹¹ Mahmudah, Husnatul, *Perempuan dan Pemilu di Indonesia Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol. 7, No. 1, Hal. 73-77, 2023

¹² Bawazir, Tohir, *Jalan Tengah Demokrasi : Antara Fundamentalisme dan Sekularisme*, Al-Kautsar, 2015

¹³ Zainuddin HM, *Islam dan Demokrasi*, uin-malang.ac.id/r/131101/islam-dan-demokrasi.html, 2013

eksekutif ataupun legislatif manapun. Namun jika kita bicara dari sisi historis, KPU memiliki jejak rekam yang cukup kontroversial. Pada 2009, KPU pernah dianggap sebagai penyelenggara yang tidak kompeten karena bisa diintervensi oleh peserta pemilihan umum dan terkesan tidak berpendirian. Jika bicara tentang isu aktual, setidaknya hingga tulisan ini dibuat, terdapat dugaan penyelewengan dari Mahkamah tertinggi untuk menyukkseskan suatu pihak pada pemilu. Perubahan konstitusi secara absolut menurut saya sendiri melanggar etika pemilu dan konstitusional, sehingga tidak mencerminkan elemen demokrasi islam yakni As-Syura yang mengedepankan kepentingan bersama.

Kedua, Al 'adalah ialah keadilan, hal ini memiliki arti penegakkan hukum harus dilaksanakan secara bijaksana dan adil. Praktik nepotise dan kolusi sebisa mungkin tidak boleh terjadi. Dalam beberapa ayat-Nya, Allah SWT menegaskan betapa pentingnya penegakan keadilan dalam pemerintahan ini. Al-Qur'an juga banyak mengatakan bahwa betapa pentingnya pelaksanaan penegakan supremasi hukum dengan adil dan tanpa diskriminasi pada kelompok tertentu. Selain itu, Nabi menyatakan bahwa kehancuran bangsa-bangsa terdahulu disebabkan oleh fakta bahwa pelanggaran dilakukan oleh "orang kecil" akan dihukum, sementara pelanggaran dilakukan oleh "orang besar" dibiarkan berlalu. Pernyataan "ekstrem" menggambarkan betapa pentingnya prinsip keadilan bagi suatu negara: "Negara-negara yang berkeadilan akan bertahan meskipun mereka kafir, sementara negara-negara yang zalim akan hancur meskipun mereka berpura-pura Islam". Dalam kontestasi pemilu khususnya di Indonesia, terkadang masih banyak kecurangan didalamnya. Tak sedikit juga terdapat darah yang tumpah akibat perebutan kekuasaan simbolis ini. Contohnya pada pemilu 2019, tercatat konflik yang menyebabkan seseorang meninggal dunia akibat terkena tembakan nyasar, dan sampai sekarang, keluarga korban masih mencari keadilan untuk sang korban.

Ketiga, Al-Musawah dalam nilai Al Musawah, semua orang sama dan setara, tidak diperbolehkan terdapat satu orang yang merasa lebih dari yang orang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Tidak mungkin bagi penguasa untuk memaksakan kehendaknya terhadap rakyat. Akibatnya, mereka bertindak secara otoriter dan eksploitatif. Dalam suatu pemerintahan, kesejajaran ini penting sebagai tindakan preventif adanya hegemoni pejabat yang berkuasa atas rakyat. Dalam pandangan Islam, pemerintah merupakan institusi yang diberikan otoritas dan kepercayaan berupa amanah oleh rakyat yang disalurkan melalui pemilihan yang bersifat jujur dan adil untuk menerapkan dan menegakkan undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, pemerintah bertanggung jawab besar kepada rakyatnya, seperti yang mereka miliki di hadapan Tuhan. Dengan demikian, pemerintah diharuskan mengemban amanah dengan jujur, dan adil. Al-Musawah disebut para ahli menjadi konsekuensi rasional dari Al 'adalah dan As syura. Bercermin pada nilai ini, pemilihan umum di indonesia terkadang masih terdapat kerikil yang menghalangi demokrasi islam yang ideal, terkadang orang yang berkuasa ataupun masih mencalonkan diri menjadi penguasa dihadapkan dengan sikap tinggi hati. Mereka yang memiliki power seringkali terlena dengan kekuasaannya sehingga bisa menghancurkan kekuasaannya sendiri. Di Indonesia kita bisa lihat kasus beberapa kali presiden yang dikudeta oleh oposisi yang tidak bisa mengokohkan rasa legowo, hal ini tentu saja menunjukkan keangkuhan para penguasa di Indonesia.

Keempat, Al Amanah memiliki definisi sikap yang menjaga rasa percaya seseorang kepada orang lain. Pemimpin atau pemerintah yang dipercayai rakyat harus

mampu menjalankan rasa kepercayaan tersebut dengan akuntabel dalam konteks pemerintahan.. Sikap adil terkait dengan amanah ini, tidak boleh meminta jabatan pemerintahan karena jabatan tersebut adalah amanah, dan mereka yang menerimanya seharusnya mempertanyakan konsep bersyukur mereka atas jabatannya. Ini menunjukkan etika Islam. Dalam konteks pemilihan umum, seringkali calon pejabat menjual janji-janji manis yang menarik simpati, namun janji tersebut tidak tertepati atau bahkan gagal total. Sehingga ini bertentangan dengan elemen demokrasi islam Al-Amanah yang sudah rakyat berikan. Al-Amanah ini merupakan mandat dari rakyat yang diberikan pada calon-calon penguasa.

Kelima, Al Masuliyah memiliki arti tanggung jawab. Semua orang tahu bahwa jabatan dan kekuasaan merupakan amanah yang wajib diperhatikan akuntabilitasnya, bukan nikmat atau fasilitas semata yang digunakan semena-mena mengatur rakyatnya. Tanggung jawab pemimpin atau penguasa memiliki dua bentuk: sebagai amanah di depan rakyat dan di depan Tuhan. Sebagai warga Indonesia kita semua harus memiliki rasa tanggung jawab. Dalam konteks pemilu, para calon penguasa harus bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya kepada rakyat, dan sebagai subjek demokrasi, kita bisa bertanggung jawab dengan memilih calon penguasa yang bisa dipertaruhkan kualitasnya.

Keenam, Al Hurriyah merupakan kebebasan, yang memiliki arti bahwa setiap anggota kelompok masyarakat memiliki hak untuk menyatakan pemahamannya. Selama itu dilaksanakan dengan bijak dan memperhatikan akhlaq yang mulia, tak ada alasan bagi pejabat yang berkuasa untuk mencegahnya. Bahkan yang harus diperhatikan ialah kemungkinan bahwa tidak akan ada lagi orang yang berani mengambil aksi kontrol dan kritik sosial untuk menegakkan keadilan. Selain itu, Kedzaliman akan lebih merajalela jika masyarakat kehilangan kontrol. Nabi SAW bersabda "Jika seseorang melihat kemunkaran, mereka harus bertindak; jika tidak mampu, mereka harus berbicara; dan jika tidak mampu, mereka harus berbicara dengan hati, bahkan dengan iman yang paling rendah". Negara yang menerapkan prinsip atau komponen demokrasi di atas akan mendapatkan legitimasi rakyat untuk pemerintahannya, dan roda pemerintahan akan berputar dengan stabil. Di Indonesia, sistem geopolitiknya menganut asas *luber jurdil* (Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil). Untuk mewujudkan sistem pemilihan yang demokratis dan partisipatif, terutama untuk pemilih pemula, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya suara mereka untuk memilih pemimpin. Seperti yang disebutkan sebelumnya, *Luber Jurdil* memiliki peran penting dalam arena pemilu karena menyalurkan hak suara pemilih untuk memilih wakil rakyat yang tepat untuk memimpin menurut hati nuraninya. *Luber Jurdil* juga bisa melahirkan karakter agar tetap berpegang teguh pada pilihannya dan tidak terpengaruh oleh pihak lain¹⁴. Sesuai tersebut, yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, pemilu dilaksanakan sebagai salah satu alat demokrasi dan cara untuk memberikan kedaulatan rakyat. Asas *Luber Jurdil* dalam pemilu sangat penting, menurut Naskah Komprehensif, Buku V, halaman 527. *Luber Jurdil* memiliki beberapa arti: langsung, yang berarti pemilih berhak untuk memilih kandidat yang sesuai dengan misinya secara langsung atau tanpa diwakili; umum, berarti seluruh warga negara yang melewati persyaratan

¹⁴ Ariyanti, Dyah, DKK, *Mewujudkan Lingkungan Demokratis Melalui Edukasi Pemilu dengan Asas Luberjurdil*, JURNAL IKRAITH-ABDIMAS Vol. 4 No. 3, November 2021

administratif bisa melangsungkan hak politiknya; dan bebas, yang artinya pemilih dapat dengan bebas memilih pilihan mereka tanpa terpengaruh oleh orang lain.¹⁵

Dengan demikian, berikut yang saya sampaikan mengenai nilai demokrasi dalam islam sejauh pengetahuan dan penelitian saya. Adapun nilai-nilai diatas memiliki tujuan yang tak lain dan tak bukan untuk mewujudkan tatanan masyarakat demokratis yang ideal menurut syariat islam, tentu saja banyak hambatan dalam pengaplikasiannya, namun jika kita teguh menanamkan norma islam kedalam segala aspek kehidupan kita, Allah SWT akan melancarkan urusan kita semua.

KESIMPULAN

Dari tulisan diatas maka dapat kita tarik kesimpulannya Dalam konteks pemilihan umum di Indonesia, demokrasi Islam muncul sebagai elemen yang memainkan peran penting dalam membentuk dinamika politik. Dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, negara ini unik dalam menggabungkan nilai-nilai demokrasi dengan prinsip-prinsip Islam dalam proses pemilihan umum. Demokrasi Islam mencerminkan usaha untuk menyatukan prinsip-prinsip demokrasi dengan ajaran Islam. Meskipun demokrasi Islam tidak bersifat homogen, variasi interpretasi dan implementasi menciptakan diskusi mendalam mengenai kontribusinya terhadap kedaulatan rakyat dan pemeliharaan identitas keagamaan. Demokrasi dalam perspektif Islam membawa konsep syura atau musyawarah, menekankan pada keputusan yang diambil melalui konsultasi dan kesepakatan bersama. Pemilihan umum dianggap sejalan dengan prinsip syariah, dengan penekanan pada transparansi, keadilan, dan keberpihakan kepada kepentingan umum. Dalam pandangan Islam, pemilihan umum diartikan sebagai langkah demokratis manakala warga negara bisa memilih calon pemimpin dan perwakilan mereka. Perspektif ini menonjolkan kewajiban terhadap transparansi, keadilan, dan keberpihakan pada nilai-nilai ajaran Islam, yang menempatkan keadilan sosial dan keberpihakan terhadap masyarakat sebagai prinsip utama. Dengan demikian, pemilihan umum menjadi refleksi dari prinsip-prinsip demokrasi Islam yang mencakup syura, musawah, adalah, amanah, masuliyah, dan hurriyyah. Nilai-nilai ini diimplementasikan dengan tujuan mencapai tatanan masyarakat demokratis yang ideal sesuai dengan syariat Islam. Tantangan seperti kurangnya keadilan dan kebebasan perlu diatasi untuk memastikan kontribusi optimal demokrasi Islam dalam menjaga kedaulatan rakyat dan mempertahankan identitas keagamaan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, Dyah, DKK. 2021. *Mewujudkan Lingkungan Demokratis Melalui Edukasi Pemilu dengan Asas Luberjurdil*. Jurnal Ikraith-Abdimas. Vol. 4 No. 3.
- AY, Jallow. 2015. *Freedom of Expression from the Islamic Perspective*. Journal of Mass Communication & Journalism.
- Bawazir, Tohir. 2015. *Jalan Tengah Demokrasi : Antara Fundamentalisme dan Sekularisme*. Al-Kautsar.
- Ginanjari, Diyar, H, Fauziah, H, Uu, Nurul. 2020. *Dimensi Pemilu dalam Sistem Distrik dan Proporsional*. Khazanah Multidisiplin. Vol. 1, No, 1.

¹⁵ Izzaty, Risdiana, Nugraha, Xavier, *Perwujudan Pemilu yang Luberjurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap*, Jurnal Suara Hukum, Vol. 01, No. 02, 2019

- Gusmiarni, Putri Rahayu, Murdiah Winarti, Ayi Budi Santosa. 2022. *Menuju Keadilan & Kebebasan: Perjuangan Nelson Mandela Untuk Mewujudkan Demokrasi Bagi Afrika Selatan Tahun 1990-1994*. Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah. Vol. 11, No. 02.
- Iqbal, Muhammad. 2015. *Pemikiran Politik Islam*. Kencana. Vol. 01.
- Iryani, Eva. 2017. *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2.
- Izzaty, Risdiana, Nugraha, Xavier. 2019. *Perwujudan Pemilu yang Luberjurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap*. Jurnal Suara Hukum. Vol. 01, No. 02.
- Mahmudah, Husnatul. 2023. *Perempuan dan Pemilu di Indonesia Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum. Vol. 7, No. 1.
- Pratama, Andreka Yuda. 2022. *Model Demokrasi Pemilu dalam Perspektif Islam*, Jurnal Perkembangan Pemikiran Modern Dalam Islam.
- Rangkuti, Afifa. 2019. *Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum.
- S, Boritt, Gabor. 2017. *Lincoln Tentang Demokrasi*. Jakarta International Law Book Services.
- Sahrani, Fadhil Ahmad. 2014. *Kebebasan Berpendapat dalam Al-Qur'an*. Jurnal al-Fath. Vol. 08. No. 02.
- Santoso, Lukman. 2013. *Prinsip Syura' dalam Konstitusional Islam*. Jurnal Dinamika Hukum dan Pendidikan di Indonesia. Vol.1, No, 1.
- Zainuddin, HM. 2013. *Islam dan Demokrasi*. uin-malang.ac.id/r/131101/islam-dan-demokrasi.html.